

BAB 5

PENUTUP DAN KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Penatausahaan Barang Milik Perusahaan Barang Milik Perusahaan di Badan Usaha Milik Daerah Perumda Pembangunan Sarana Jaya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Aspek Pembukuan

Penatausahaan barang Milik Perusahaan Perumda Pembangunan Sarana Jaya dalam hal pembukuan atau pencatatan yang dilakukan pada Perumda Pembangunan Sarana Jaya masih bersifat manual dengan menggunakan sistem manual dan juga pernah menggunakan sistem aset namun tidak berjalan maksimal sehingga Pembukuan atau pencatatan barang milik Perusahaan yang dilakukan oleh pengurus barang belum dilakukan dengan baik, dimana belum adanya Penggolongan barang yang baku / standar, Kodefikasi barang yang berbeda – beda setiap tahunnya yang menyebabkan sulitnya untuk mengidentifikasi barang dan belum adanya standarisasi baku Daftar / Kartu Inventaris Ruangan sehingga belum adanya data tercatat pada ruangan – ruangan yang seharusnya data tersebut tercatat sehingga memudahkan pembukuan di Lingkungan Perumda Pembangunan Sarana Jaya. Hal ini disebabkan pada Faktor Sumber Daya Manusia yang belum dilakukan adanya bimtek/pelatihan kepada Pegawai, Pemahaman dan pengetahuan yang kurang terhadap Pengelolaan barang/aset, Pada Faktor Hukum belum adanya Dasar/standar Hukum yang dapat dijadikan guide di dalam implementasi, pada Faktor Penilaian Aset belum adanya Data Nilai yang dilakukan oleh Divisi SDM dan Umum terhadap Data Keuangan dan pada Faktor Komitmen Pimpinan yang belum menyeluruh diperkuat oleh Regulasi dan arahan Pimpinan kepada Pegawai sehingga faktor – faktor

penghambat ini lah yang membuat Penatausahaan dalam Aspek Pembukuan belum berjalan dengan baik.

2. Aspek Inventarisasi

Dilihat dari Aspek Inventarisasi dalam Penatausahaan barang milik Perusahaan di Lingkungan Perumda Pembangunan Sarana Jaya bahwa dapat disimpulkan belum dilakukan dengan baik. Belum adanya alur proses yang jelas terhadap Inventarisasi / sensus aset yang dilakukan Perumda Pembangunan Sarana Jaya membuat hingga sampai saat ini belum adanya laporan inventarisasi aset yang berjalan. Selain itu, adanya barang/ aset dalam keadaan yang rusak namun sama sekali belum dilakukan penghapusan aset, ketiga terdapat regulasi yang sudah tidak relevan terhadap SK Organisasi Tata Kerja di Lingkungan Perumda Pembangunan Sarana Jaya yaitu SK Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tim Penghapusan Aset / Barang di Lingkungan Perumda Pembangunan Sarana Jaya dan SK Direksi Nomor 15 tahun 2024 Tentang Pengurus Barang yang membuat Penghapusan Barang dan Pelaksanaan Implementasi Inventarisasi Barang/ aset di Lingkungan Perumda Pembangunan Sarana Jaya menjadi terhambat dan Dokumen inventarisasi yang berbeda – beda antara Divisi SDM dan Umum dan Divisi Keuangan yang membuat Data Inventarisasi tidak menjadi satu kesatuan sehingga sulit untuk dilakukan dalam satu pelaporan. Hal ini disebabkan pada Faktor Sumber Daya Manusia yang belum dilakukan adanya bimtek/pelatihan kepada Pegawai, Pemahaman dan pengetahuan yang kurang terhadap Pengelolaan barang/aset, Pada Faktor Hukum belum adanya Dasar/standar Hukum yang dapat dijadikan guide di dalam implementasi, pada Faktor Penilaian Aset belum adanya Data Nilai yang dilakukan oleh Divisi SDM dan Umum terhadap Data Keuangan dan pada Faktor Komitmen Pimpinan yang belum menyeluruh diperkuat oleh Regulasi dan arahan Pimpinan kepada Pegawai

sehingga faktor – faktor penghambat ini lah yang membuat Penatausahaan dalam Aspek Inventarisasi belum berjalan dengan baik.

3. Aspek Pelaporan

Penatausahaan barang milik Perusahaan dalam hal pelaporan yang dilakukan pada Perumda Pembangunan sarana Jaya belum sepenuhnya dilakukan dengan baik dikarenakan Laporan dilakukan secara sendiri – sendiri yaitu Divisi Keuangan & Akuntansi dan Divisi SDM dan Umum juga melakukan Laporan Barang / aset yang belum memiliki standar sehingga pada aspek pelaporan ini masih kurang baik dan belum dilakukannya Pelaporan secara semesteran dan Tahunan sehingga belum adanya laporan Penatausahaan secara berkala di Lingkungan Perumda Pembangunan Sarana Jaya Provinsi DKI Jakarta. Hal ini disebabkan pada Faktor Sumber Daya Manusia yang belum dilakukan adanya bimtek/pelatihan kepada Pegawai, Pemahaman dan pengetahuan yang kurang terhadap Pengelolaan barang/aset, Pada Faktor Hukum belum adanya Dasar/standar Hukum yang dapat dijadikan guide di dalam implementasi, pada Faktor Penilaian Aset belum adanya Data Nilai yang dilakukan oleh Divisi SDM dan Umum terhadap Data Keuangan dan pada Faktor Komitmen Pimpinan yang belum menyeluruh diperkuat oleh Regulasi dan arahan Pimpinan kepada Pegawai sehingga faktor – faktor penghambat ini lah yang membuat Penatausahaan dalam Aspek Pelaporan belum berjalan dengan baik.

B. Saran

Berdasarkan Penelitian yang telah dilaksanakan, maka saran yang dapat penulis berikan sebagai berikut:

1. Berkaitan dengan Aspek Pembukuan:

Pada Faktor Sumber Daya Manusia untuk meningkatkan kualitas pengetahuan Pegawai dengan melakukan pembinaan, Bimtek Pelatihan dan meningkatkan koordinasi antar Divisi agar penatausahaan barang milik Perusahaan dalam hal pembukuan dapat dilakukan dengan baik tentunya dengan beberapa strategi / rekomendasi adalah perlu terkait faktor Dasar Hukum yaitu dibentuknya suatu Dasar/ Standar Penggolongan sehingga tidak adanya lagi kesulitan melakukan Penggolongan Barang yang ada di lingkungan perumda Pembangunan Sarana Jaya. Strategi atau rekomendasi yang kedua adalah perlu dilakukan dan disusun standar Penomoran / kodefikasi barang yang ada sehingga data yang tertulis dalam pembukuan betul-betul akurat. Strategi / rekomendasi ketiga adalah perlu adanya skema / tabel Daftar / Kartu Inventaris Ruangan yang dapat menggambarkan Kondisi barang, jumlah barang dan keberadaan barang sehingga dapat memudahkan pengguna barang dan pengurus barang dalam hal Monitoring dan Evaluasi barang/ aset Selain itu, strategi dan rekomendasi berikutnya yaitu terkait Faktor Penilaian Aset adalah penilaian pada Data Penatausahaan yang terintegrasi dengan Divisi Keuangan, perlunya penerapan sistem informasi berbasis teknologi yang lebih modern dalam pembukuan sehingga memudahkan dalam proses pembukuan dan bisa diakses oleh semua Pegawai di lingkungan Perumda Pembangunan Sarana Jaya dan yang terakhir Faktor Komitmen Pimpinan dalam pengesahan standar regulasi pada aspek Pembukuan yaitu Penggolongan Barang, Kodefikasi/Penomoran barang dan Kartu Inventaris Ruangan yang dapat menjadi suatu alat kerja kepada Pegawai Teknis untuk

implementasi Penatausahaan di Perumda Pembangunan Sarana Jaya dapat berkembang dan lebih baik lagi.

2. Berkaitan dengan Aspek Inventarisasi

Pada faktor Komitmen Pimpinan dan Faktor Sumber Daya Manusia diharapkan kepada Pimpinan agar Perumda Pembangunan Sarana Jaya dapat konsern terhadap Kualitas pengetahuan pada Pegawai pada Penugasan Inventarisasi sensus aset yang dilaksanakan di Lingkungan Perumda Pembangunan Sarana Jaya dengan adanya bimtek, pelatihan dan Penugasan yang disertai pelaporan yang konkret atas Hasil Inventarisasi. Rekomendasi kedua pada faktor Dasar Hukum, Perumda Pembangunan Sarana Jaya agar dapat membuat alur flow Inventarisasi sensus aset di Lingkungan Perumda Pembangunan Sarana Jaya agar kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik, pengurus dapat disiplin membuat label dan kode barang dan menempelkan langsung pada setiap barang milik Perusahaan, agar tertib dalam pembuatan kodefikasi barang, maka label dan kode barang langsung dibuat pada saat adanya pengadaan/pembelian barang setelah dicatat dalam buku inventaris. Membuat kartu inventaris barang dan membuat daftar rekap barang inventaris dan menempelkannya di setiap ruangan sehingga barang milik Perusahaan bisa dikontrol dengan baik sehingga tidak lagi ada kejadian barang milik Perusahaan yang hilang atau tidak jelas keberadaannya. Adapun Strategi atau rekomendasi ketiga adalah bahwa atas belum terlaksananya Penghapusan Barang/ aset di Perumda Pembangunan Sarana Jaya dan belum berjalan secara maksimalnya pengurus barang dikarenakan adanya SK Direksi Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tim Penghapusan Barang/ aset di Lingkungan Perumda Pembangunan Sarana Jaya dan SK Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Pengurus Barang maka Perumda Pembangunan Sarana Jaya perlu melakukan Revisi

terhadap regulasi dimaksud agar penghapusan dan pengurus barang dapat sesuai dan relevan dengan SK Organisasi dan Tata Kerja yang baru di Lingkungan Perumda Pembangunan Sarana Jaya dan strategi / rekomendasi terakhir pada faktor Penilaian aset adalah perlu adanya rekonsiliasi data antara data inventaris pada Divisi SDM dan Umum dan Data Nilai Barang yang berada di Divisi Keuangan sehingga data dapat lebih akurat dan memudahkan pelaporan.

3. Berkaitan dengan Aspek Pelaporan,

Pada Faktor Sumber Daya Manusia dan Faktor Komitmen Pimpinan Diharapkan kepada pimpinan Perumda Pembangunan Sarana Jaya untuk memonitoring dengan cara setiap saat melakukan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penatausahaan barang milik Perusahaan, apakah pengurus barang telah melakukan tugasnya dengan baik khususnya dalam pembuatan laporan barang milik Perusahaan selama semesteran (6 Bulan) dan 1 (satu) tahun sekali dan pada faktor Penilaian Aset mengingat laporan yang masih dilakukan sendiri – sendiri oleh Divisi SDM dan Umum dan Divisi Keuangan, seringkali data laporan tidak akurat sehingga perlu adanya integrasi nilai aset dan Perlu adanya Komitmen Pimpinan di dalam Pengesahan Regulasi yang berkaitan dengan Pelaporan Penatausahaan di lingkungan Perumda Pembangunan Sarana Jaya.

Daftar Pustaka

- Beddy Iriawan Maksudi, 2023. Dasar – Dasar Administrasi Publik. Depok; Rajawali Pers.
- Bogdan dan Taylor, 2000. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remadja Karya.
- Dadang S dan Yudi R, 2022. Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. Bandung; Remaja Rosdakarya
- Daniel Sari Patontongan, 2020. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Toraja Utara. Makassar
- Devi Permana, 2015. Analisis Penatausahaan Aset Sekolah Luar Biasa Negeri Pahlawan Kabupaten Indramayu
- DKI Jakarta. (2017). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi DKI Jakarta 2017-2022. Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- DKI Jakarta. (2018). Peraturan Daerah No 11 Tahun 2018 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 1982 tentang Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya Daerah Khusus Ibukota Jakarta Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- Fany Asmara. 2020. Evaluasi Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pada Cv Sarana Adi Putra Periode 2017 S/D 2018. Bandung.
- Hande Karadag. 2015. Financial Management Challenges in small and medium – sized Enterprises A strategic Management Approach. America: Wharton School, University Of Pennsylvania.

- Hasyim Adnan, 2018. Fungsi Inventarisasi Barang Milik Daerah Dalam Rangka Tertib Administrasi Pada Dinas Pengelolaan Keuangandan Aset Kabupaten Pandeglang : Pandeglang.
- Herry Supardan. 2020. Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah. Jakarta
- Jens Ledet Jensen, et al. 2018. A Comparative Distributional Method for Public Administration Illustrated Using Public Budget Data. Denmark: Aarhus University.
- Miftah Thoha. 2017. Ilmu Administrasi Publik Kontemporer. Jakarta
- Kwak Nok Chan. 2024. Public Administration in authoritarian regimes: Propositions for comparative research. Hongkong: Asia Pacific Journal of Public Administration.
- Lantemona, et al, Analisis Penatausahaan Barang Milik Daerah di Kabupaten Kepulauan Talaud. Universitas Sam Ratulangi.
- Monika. 2015 Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Tomohon. Tomohon.
- Moses Demetouw. 2014. Pengaruh Manajemen Aset Terhadap Optimalisasi Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Jayapura. Jayapura.
- Muhadjir, Noeng.2000. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengeloaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.
- Peraturan Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Penatausahaan Barang Milik Daerah
- Peraturan Direksi Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penghapusan Barang / aset yang dimiliki Perusahaan Perumda Pembangunan Sarana Jaya
- Peraturan Direksi Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tim Penghapusan Barang / aset inventaris Milik Perumda Pembangunan Sarana Jaya
- Peraturan Direksi Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Pengurus Barang / aset inventaris milik Perumda Pembangunan Sarana Jaya
- Ratnasari. 2015. Manajemen Aset Daerah melalui Pengamanan Barang Milik Daerah pada Aset Tidak Bergerak di Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya.
- Rahmah Mulianty Umar, S.H.2020. Optimalisasi Pengelolaan Kekayaan Daerah Oleh Badan Usaha Milik Daerah Mamuju.
- Rahima, et al, 2015. Pengelolaan Aset Tetap Daerah Dalam Mengoptimalkan Pemanfaatan Aset Daerah. Jakarta.
- Renan Favarao da Silva et al, 2021. Mapping the Literature on Asset Management: A Bibliometric Analisis. Brazil: University Of Sao Paulo Brazil.
- Rizky Maulidin. 2020. Penatausahaan Barang Milik Negara pada Kantor Wilayah DKI Jakarta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Jakarta: Politeknik STIA LAN Jakarta.
- Sanjaya Pinem. 2020. Aplikasi Inventarisasi Aset Berbasis Web Dengan Metode Waterfall. Jakarta.

- Simamora, et al. 2013. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Pengelolaan Aset Pasca Pemekaran Wilayah dan Pengaruhnya terhadap Kualitas Laporan keuangan Pemerintah di Kabupaten Tapanuli Selatan. Sumatera Utara.
- Sini-Katsu Kinnunen, *et al.* 2018. Internet of Things in Asset Management: Insights from Industrial Professionals and Academia. Sunderland: University Of Sunderland.
- Sugiono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Jakarta.
- Suparman et al, 2018. Pengelolaan Aset Daerah Dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Pada Dppkad Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku. Bandung.
- Undang Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara.
- Yudho, (2014). Jurnal Model Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Dalam Rangka Mewujudkan *Good Corporate Governance*. Surakarta
- Zahrawani et al, 2021. Analisis Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dan Pengaruhnya terhadap Kinerja Lembaga Bank Syariah. Surakarta